

BAB III

TEMUAN PENELITIAN

Bab ini mencakup temuan-temuan yang diperoleh peneliti. Pada bab ini peneliti menjabarkan kegiatan *agenda setting* terkait keberpihakan DPR RI terhadap beras nasional pada Majalah Parlementaria edisi 222 tahun 2023. Peneliti dalam hal ini melakukan wawancara *face to face* atau secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara kepada subjek penelitian. Narasumber dalam penelitian ini yakni bernama Fahmi Harfa selaku senior analis media DPR RI dan Agung Hidayat, S.I.P selaku redaktur. Peneliti juga berhasil mengumpulkan data pendukung berupa kuesioner yang dibagikan kepada 49 responden yang merupakan masyarakat umum guna memberikan persepsi publik terhadap keberpihakan DPR RI dalam kebijakan beras nasional. Peneliti menggunakan data sekunder dari dokumentasi konten media sosial Instagram resmi milik DPR RI @DPR_RI, TikTok DPR RI @DPR_RI dan pemberitaan pada Majalah Parlementaria. Data yang didapatkan selanjutnya akan di analisis dan dideskripsikan guna memperoleh kesimpulan hasil temuan penelitian.

3.1 Implementasi Program Agenda Setting

Implementasi program *agenda setting* DPR RI dilakukan secara aktif dengan mengikuti dan mengawasi perkembangan isu-isu yang beredar di masyarakat lewat kegiatan *media monitoring* yakni melalui media cetak maupun media *online* yang kemudian dikoordinasikan bersama melalui *agenda setting* untuk menentukan prioritas isu yang selanjutnya akan diolah menjadi rekomendasi isu sebelum anggota dewan melakukan kunjungan kerja ke masyarakat guna menyerap aspirasi secara langsung untuk dibawa ke rapat dengar pendapat bersama pemerintah dan pihak terkait. Implementasi program *Agenda setting* berdasarkan buku Analisis Kebijakan Publik (Santoso, 2010:74) dapat berjalan sesuai tujuan apabila memenuhi syarat berikut:

3.1.1 Proses Pencarian dan Pemilihan Isu Untuk Ditangani Pemerintah

Proses pencarian dan pemilihan isu di DPR RI dilakukan melalui *media monitoring* yang merupakan bagian dari kegiatan *agenda setting* yang selanjutnya akan dibuat ke dalam bentuk rekomendasi guna menentukan prioritas isu sebelum anggota dewan terjun ke lapangan melakukan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Istilah *agenda setting* mengacu pada dua konsep utama yakni ‘agenda’ yang merujuk pada daftar topik atau kegiatan yang dianggap vital serta pantas mendapatkan perhatian prioritas, dan ‘*setting*’ yang merujuk pada aktivitas penyusunan atau penyiapan dari agenda tersebut. Proses dalam *agenda setting* dapat dijelaskan sebagai suatu tahapan di mana individu atau pemilik agenda tersebut merangkai berbagai topik dan kegiatan dalam urutan prioritas berdasarkan urgensi mereka (Santoso, 2010:72).

3.1.1.1 Media Monitoring

DPR RI dalam melakukan proses pencarian dan pemilihan isu yang perlu ditangani pemerintah diawali dengan cara menyaring isu yang beredar di media *online* dan media cetak. Media *online* yang menjadi fokus perhatian DPR RI berjumlah 12 media *online* di antaranya detikcom, Antaranews, Viva.co.id, RMOL.id, Republika.co.id, CNN Indonesia, Liputan6.com, Tribunnews.com, Kumparan.com, Kompas.com, Tempo.com, dan Suara.com, serta enam media cetak di antaranya Kompas, Jawa Pos, Media Indonesia, Bisnis Indonesia, Kontan, dan Rakyat Merdeka.

 ANALISIS MEDIA ONLINE DPR RI	
Kliping ID	O48011223100304
Sumber	Suara.com
Isu	Pimpinan Dewan
Judul	Marak Isu Beli Beras Dibatasi, DPR Minta Masyarakat Tidak Panik
Anggota DPR	Lodewijk Freidrich Paulus
Fraksi	Golkar
URL	https://suara.com/dpr/2023/10/03/163201/marak-isu-beli-beras-dibatasi-dpr-minta-masyarakat-tidak-panik
Tanggal/Waktu Rilis	Selasa, 3 Oktober 2023/16:32 WIB
Penulis Berita	Fabiola Febrinastri
Peringkasan	LF/RA
Tone	Positif
Ringkasan Berita	Wakil Ketua DPR, Lodewijk Freidrich Paulus mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying terkait pasokan beras yang menjadi perhatian belakangan ini. Ia menyatakan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan beras dan menghadapi tantangan seperti El Nino. Pembatasan pembelian beras hingga 10 kg di toko ritel merupakan tindakan sementara atas arahan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan akan dicabut setelah beras impor masuk ke Indonesia. Lodewijk juga menyoroti pentingnya mengatasi masalah cuaca yang dapat mempengaruhi musim tanam dan panen produk pertanian di Indonesia.
Pernyataan Anggota DPR	Lodewijk Freidrich Paulus: "Kita sedang menghadapi El Nino, Pemerintah juga telah mengambil kebijakan untuk impor beras, tentunya jangan sempet masyarakat menjadi panic buying."
Implikasi	Berita ini berimplikasi positif terhadap citra DPR. Berita ini menunjukkan DPR menjalankan fungsi Pengawasan.

Gambar 3.1 Media Monitoring Analisis Media Online DPR RI

Sumber: Arsip Analis Media DPR RI

DPR RI melakukan analisis media *online* terkait topik beras nasional dalam artikel milik suara.com yang berjudul “Marak Isu Beras Dibatasi, DPR Minta Masyarakat Tidak Panik” merupakan bukti bahwa DPR RI dalam hal ini sebagai lembaga legislatif turut terlibat aktif mengawasi serta memberikan masukan terhadap kebijakan beras nasional yang dilakukan oleh pemerintah. DPR RI dalam artikel tersebut meminta masyarakat untuk tidak panik terkait persediaan beras belakangan ini. Wakil ketu DPR RI, Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan beras dan menghadapi tantangan seperti el nino. Lodewijk juga menyoroti pemerintah terkait pentingnya mengatasi masalah cuaca yang dapat memengaruhi musim tanm dan panen produk pertanian di Indonesia.

3.1.1.2 Agenda Setting

Agenda setting merupakan suatu tahapan serta proses strategis di dalam sebuah realitas kebijakan publik. *Agenda setting* dalam prosesnya dilakukan melalui rapat yang berisi penentuan isu prioritas agenda publik menjadi hal yang krusial. Ketika suatu isu berhasil diangkat menjadi masalah publik serta mendapat prioritas dalam suatu agenda publik, maka isu tersebut memiliki hak untuk menerima lebih banyak alokasi sumber daya publik dibanding dengan isu lainnya.



Gambar 3.2 Rapat Redaksi

Sumber: Dokumentasi pribadi

Menurut Barbara Nelson (1984:27) dalam Retno Widyastuti tahun 2023 mengatakan bahwa *agenda setting* merupakan tahapan di mana pemerintah secara aktif mengikuti perkembangan isu-isu publik yang baru, kemudian membuat keputusan melalui rapat, serta mengawasi dan mengkoordinasikan upaya organisasi untuk memberi tanggapan serta menyelesaikan masalah yang ada.

Proses *agenda setting* terdiri dari tiga tahapan yang saling terkait, pertama agenda media menentukan prioritas isu-isu yang akan dipublikasikan, kedua agenda publik menyoroti isu-isu yang memengaruhi atau berhubungan dengan kepentingan masyarakat, ketiga agenda kebijakan mencerminkan kepentingan isu-isu publik bagi pembuat kebijakan. Ketiga tahap ini saling terkait karena kekuatan media berkaitan erat dengan kekuasaan. *Agenda setting* mencerminkan kekuatan dan pengaruh media yang signifikan dalam bentuk pandangan masyarakat karena media memiliki kemampuan untuk memperoleh perhatian publik terhadap suatu peristiwa yang kemudian dapat memengaruhi pandangan masyarakat tentang kepentingan suatu isu (Rakhmat, 1985).

Berikut ini tiga agenda kebijakan yang mencerminkan kepentingan isu-isu publik bagi pembuat kebijakan:

1.) Agenda media menentukan prioritas isu-isu yang akan dipublikasikan, hal ini merujuk pada media DPR RI dalam membuat keputusan terkait topik dan peristiwa yang akan dilaporkan dan diberi perhatian lebih. Media DPR RI memilih dan menekankan isu-isu tertentu berdasarkan relevansi dan dampaknya, sehingga memengaruhi persepsi publik tentang isu apa yang penting. DPR RI dalam mengidentifikasi penentuan prioritas isu berusaha untuk dapat membentuk opini publik terkait kepentingan masalah ketahanan pangan. DPR RI melalui berbagai media di antaranya Majalah Parlementaria, TikTok @DPR_RI dan akun resmi Instagram @DPR_RI secara aktif menyampaikan informasi terkait kebijakan pemerintah mengenai ketahanan pangan di Indonesia.



Gambar 3.3 Postingan Instagram DPR RI Mengenai Impor Beras

Sumber: Instagram Resmi DPR RI @DPR_RI

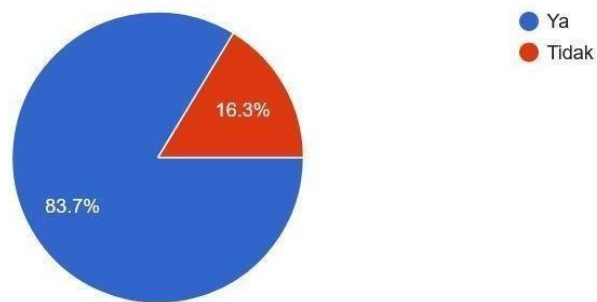
Dalam postingan tersebut berisi penjabaran anggota komisi IV DPR RI Daniel Johan menindaklanjuti terkait impor beras disaat sedang panen raya. Daniel menegaskan agar pemerintah tidak melakukan impor beras di saat sedang panen raya. Kebijakan pemerintah melakukan impor beras saat panen raya menurut Daniel akan memberikan dampak buruk terhadap kesejahteraan petani lokal di Indonesia. Daniel menyoroti terkait urgensi menjaga ketahanan pangan serta mendukung produksi beras dalam negeri secara mandiri. Melalui postingan tersebut mencerminkan keberpihkan DPR RI terhadap ketahanan pangan serta kesejahteraan petani lokal. DPR RI dalam hal ini mendesak pemerintah agar fokus pada penguatan produksi dalam negeri serta memberikan dukungan kepada petani lokal dibandingkan melakukan impor beras dengan harapan kebijakan yang diambil oleh pemerintah lebih berpihak kepada petani

dan mendukung tujuan jangka panjang guna menciptakan ketahanan pangan di Indonesia.

2.) Agenda publik menyoroti isu-isu yang memengaruhi atau berhubungan dengan kepentingan masyarakat, hal ini merujuk pada isu-isu penting yang ada di publik dan memerlukan perhatian lebih guna menciptakan *public awereness*. DPR RI menonjolkan hal ini dengan cara memberi penekanan sebuah isu yang dianggap penting untuk diketahui dan dipercaya oleh masyarakat, oleh karena itu hal ini memerlukan perhatian khusus sebab berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Apakah Anda mengetahui isu tentang beras nasional?

49 responses



Gambar 3.4 Survei Terhadap Publik Terkait Isu Beras Nasional

Sumber: Survei Oleh Peneliti

DPR RI dalam fungsinya sebagai lembaga memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan mengenai isu beras nasional. Berdasarkan hasil survey di lapangan yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa sebanyak 69,4 persen publik dari 49 responden membaca Majalah Parlementaria, begitu pula terkait

dengan isu tentang beras nasional, sebesar 83,7 persen publik mengatakan bahwa mereka mengetahui terkait isu tersebut. Lebih lanjut diketahui sebanyak 77,6 persen publik dari 49 responden membaca Majalah Parlementaria edisi 222 tentang Beras Nasional. Dalam fungsinya terkait *agenda setting*, sebanyak 24,5 persen responden mengatakan sangat setuju, 40,8 persen setuju, 30,6 persen cukup setuju, dan sisanya sebesar 4,1 persen mengatakan tidak setuju dengan *agenda setting* yang ada dalam Majalah Parlementaria.

Selanjutnya terkait dengan pembahasan yang dibuat oleh DPR RI melalui Majalah Parlementaria tentang isu beras nasional sebanyak 44,9 persen publik mengatakan sangat setuju terkait isu tersebut untuk diketahui oleh masyarakat, 44,9 persen publik setuju, 8,2 persen setuju, dan sisanya sebesar 2 persen mengatakan tidak setuju, begitu pula dengan isu-isu lain yang diangkat oleh DPR RI sebanyak 36,7 persen publik mengatakan sangat setuju, 44,9 persen setuju, dan sisanya 18,4 persen mengatakan cukup setuju.

Selanjutnya mengenai *angle* penulisan berita pada Majalah Parlementaria sebanyak 24,5 persen publik dari 49 responden mengatakan sangat setuju, 42,9 persen setuju, 28,6 cukup setuju, dan sisanya sebesar 4,1 persen mengatakan *angle* penulisan berita pada Majalah Parlementaria tidak menarik untuk dibaca.

Terakhir, DPR RI dalam fungsinya sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan mengenai isu beras nasional sebanyak 22,4 persen publik mengatakan sangat setuju dengan pendapat DPR RI mengenai isu tersebut, 44,9 persen setuju, 22,4 persen setuju, dan sisanya

sebanyak 10,2 persen mengatakan tidak setuju dengan pendapat DPR RI mengenai isu beras nasional.

Berdasarkan survey yang telah dilaksanakan oleh peneliti menghasilkan kesimpulan bahwa agenda publik menyoroti isu-isu yang memengaruhi atau berhubungan dengan kepentingan masyarakat sudah sesuai dengan hasil survey.

3.) Agenda kebijakan mencerminkan kepentingan isu-isu publik bagi pembuat kebijakan, hal ini merujuk pada pembuat kebijakan fokus pada isu-isu yang dianggap penting oleh publik. Pembuat kebijakan dalam hal ini DPR RI mempertimbangkan isu-isu publik tersebut saat merumuskan kebijakan dan keputusan pemerintah. DPR RI sebagai lembaga legislatif bertanggung jawab penuh dalam menyortir isu-isu publik saat melakukan perumusan kebijakan. Sebagai kepanjangan tangan dari masyarakat, DPR RI berupaya melibatkan masyarakat pada setiap pembuatan kebijakan guna memastikan setiap kebijakan yang dibuat mencerminkan kepentingan masyarakat. Partisipasi dan masukan masyarakat dalam pembuatan kebijakan diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang sesuai dan menjawab kebutuhan masyarakat.



Gambar 3.5 Postingan TikTok DPR RI Mengenai Impor Beras

Sumber: TikTok DPR RI @DPR_RI

Dalam video TikTok yang diunggah milik akun resmi DPR RI salah satu anggota Komisi VI dari Fraksi PDIP, Evita Nursanty mencecar Zulkifli Hasan selaku Menteri Perdagangan terkait kelangkaan beras yang terjadi di Indonesia. Evita mengatakan pemerintah kurang tepat dalam melakukan kebijakan impor beras yang mengakibatkan harga beras melambung tinggi. Evita menegaskan pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan impor beras karena impor beras dinilai hanya menjadi penyelesaian masalah sesaat. Apabila impor beras terus dilakukan permasalahan serupa akan terus menerus berulang dan masyarakat yang akan merasakan dampaknya karena harga beras di pasaran melambung tinggi.

3.1.1.3 Rekomendasi Isu

Langkah kedua yang dilakukan DPR RI dalam proses pencarian dan pemilihan isu yakni melihat keberpihakan dan urgensi dari isu itu sendiri yang selanjutnya akan dibuat dalam bentuk rekomendasi isu aktual yang berupa dorongan-dorongan yang sifatnya mendorong pemerintah untuk segera menangani isu tersebut.

Pemerintah berencana mengimpor 5,15 juta ton beras di tahun 2024

Author: Tim Analisis DPR | Last updated: June 25, 2024

2 minute read

Pemerintah berencana mengimpor 5,15 juta ton beras di tahun 2024 untuk menambal penurunan produksi beras yang diperkirakan cukup signifikan, DPR perlu:

- Mendorong Pemerintah untuk menjelaskan secara detail dan komprehensif mengenai rencana tambahan impor beras menjadi 5,15 juta ton, mengingat jumlah tersebut meningkat dari rencana impor beras sebelumnya sebesar 3,6 juta ton;
- Mendorong Kementerian Pertanian (Kementan) mengkaji dan memperhitungkan kembali secara cermat mengenai rencana besaran impor beras yang dilakukan tersebut, mengingat impor beras berpotensi merugikan petani beras dalam negeri. Diharapkan Kementan memiliki solusi utama lainnya ketimbang memprioritaskan impor beras dalam jumlah yang besar;
- Mendorong Kementan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Pemerintah Daerah (Pemda), dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengintegrasikan data stok beras di Indonesia, termasuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP), sehingga dapat diketahui secara pasti data jumlah produksi beras di Indonesia, agar jumlah tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi beras;
- Mendorong Kementan, Bapanas, dan Pemda untuk menyusun upaya dan strategi untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri, baik melalui pemberian bibit unggul, wilayah tanam yang tepat, perluasan lahan tanam, strategi untuk mengatasi masalah gagal panen, penanganan tanam padi pada fenomena El-Nino hingga meningkatkan kualitas petani beras dalam negeri, mengingat tiap tahunnya selalu dilakukan rencana impor beras yang cukup tinggi, dan hal tersebut berpotensi merugikan petani dalam negeri;
- Mendorong Kementan berhati-hati dan tidak tergesa-gesa menentukan kebijakan impor beras, serta memastikan memiliki data beras dalam negeri yang riil sebelum menetapkan kebijakan impor beras;
- Mendorong Kementan bersama Serikat Petani untuk mengevaluasi secara komprehensif mengenai permasalahan tata kelola beras di Indonesia, sehingga apabila kebijakan impor beras tetap dilakukan, kebijakan tersebut memiliki landasan alasan yang kuat dan tidak merugikan ataupun berdampak buruk pada perekonomian petani dalam negeri;
- Mendorong Pemerintah mengawasi stok beras di gudang Bulog agar mencukupi kebutuhan masyarakat di Indonesia, dan memastikan tidak ada penumpukan atau penimbunan beras, mengingat hal tersebut berpengaruh terhadap stok maupun harga beras di pasaran;
- Mendorong Pemerintah memperbaiki tata kelola CBP, sistem panen, hingga penyaluran ataupun pendistribusian beras, agar CBP dapat selalu terpenuhi sesuai target, terlebih ketika musim panen tiba, sehingga tidak perlu bergantung pada kebijakan impor beras, terlebih dalam jumlah yang cukup banyak, dan diharapkan ke depannya Pemerintah bisa lebih mengandalkan produksi beras dari dalam negeri serta mengutamakan kesejahteraan petani nasional;
- Menyatakan bahwa DPR turut hadir dan berkomitmen dalam memperjuangkan aspirasi dan kesejahteraan petani lokal serta dalam memastikan pemerintah selalu menyediakan stok beras yang cukup bagi seluruh masyarakat Indonesia dan mampu menjaga kestabilan harga beras di pasaran.

Komisi IV | Pertanian

Gambar 3.6 Rekomendasi Isu Mengenai Impor Beras

Sumber: Arsip Analisis Media DPR RI

Melalui rekomendasi di atas, DPR RI berharap pemerintah memperhatikan kebijakan terkait pangan di Indonesia agar tidak hanya mengandalkan impor tetapi mendukung keberlanjutan dan mensejahterakan petani lokal. DPR RI melalui rekomendasi tersebut mendorong pemerintah

untuk mengembangkan strategi guna memperkuat posisi petani lokal. Hal ini penting agar kedaulatan pangan di Indonesia berada pada posisi yang stabil, meningkatkan produksi pertanian, serta memastikan kesejahteraan petani lokal sehingga kebijakan pangan yang dibuat pemerintah dapat menuai manfaat dalam jangka panjang untuk masyarakat Indonesia dan ekonomi nasional.

3.1.1.4 Kunjungan Kerja

Fahmi Harfa selaku informan juga menyebutkan langkah ketiga yang dilakukan DPR RI yakni dengan cara melakukan kunjungan kerja dengan tujuan menyerap aspirasi langsung dari daerah dengan cara anggota dewan terjun langsung guna membahas urgensi isu yang memerlukan penanganan segera.



Komisi IV DPR RI Tinjau Pompanisasi di Sukoharjo untuk Tingkatkan Produktivitas Beras

📷 : Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi bersama Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek) saat meninjau Program Pompanisasi di Sukoharjo pada Rabu (13/11/2024)/Foto : Humas Bapanas

Oleh Farizy Adhy Rachman, Kamis, 14 November 2024 | 05:48 WIB - Redaktur: Untung S - 315

Gambar 3.7 Berita Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI

Sumber: InfoPublik

Pada artikel yang diunggah InfoPublik dengan judul “Komisi IV DPR RI Tinjau Pompanisasi di Sukoharjo untuk Tingkatkan Produktivitas Beras” DPR RI menunjukkan

keberpihakannya terhadap petani lokal dengan terjun langsung melakukan kunjungan kerja. Kunjungan kerja yang dilakukan DPR RI bertujuan untuk mendorong peningkatan produktivitas beras nasional, melalui Komisi IV DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Sukoharjo. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh ketua dari Komisi IV DPR RI yakni Siti Heduati Soeharto bersama Kepala Badan Pangan Nasional yakni Arief Prasetyo Adi. Kunjungan kerja yang dilakukan oleh DPR RI bertujuan untuk meninjau langsung kondisi pertanian lokal guna memastikan ketahanan pangan di Indonesia serta memberikan dorongan untuk meningkatkan produksi beras lokal. Hasil kunjungan kerja yang dilakukan oleh anggota dewan selanjutnya dibawa ke rapat untuk dikoordinasikan dan didiskusikan lebih lanjut berdasarkan temuan serta masukan yang diperoleh saat melakukan kunjungan kerja.

3.1.2 Pemilihan Masalah untuk Ditangani Pemerintah

DPR RI sebagai lembaga legislatif bertanggung jawab penuh dalam menyortir isu-isu publik saat melakukan perumusan kebijakan. Sebagai kepanjangan tangan dari masyarakat, DPR RI berupaya melibatkan masyarakat pada setiap pembuatan kebijakan guna memastikan setiap kebijakan yang dibuat mencerminkan kepentingan masyarakat. Partisipasi dan masukan masyarakat dalam pembuatan kebijakan diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang sesuai dan menjawab kebutuhan masyarakat.



Gambar 3.8 Keberpihakan DPR RI Terhadap Petani Lokal

Sumber: TikTok DPR RI @DPR_RI

Dalam video TikTok yang diunggah milik akun resmi DPR RI salah satu anggota dari Fraksi PKS, Slamet menyampaikan pendapatnya terkait impor beras yang dilakukan oleh pemerintah. Slamet menyampaikan bahwa DPR RI menolak dengan tegas impor beras dengan alasan pemenuhan stok CBP mengingat stok beras di Indonesia masih dalam kategori sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Kedua DPR RI menolak impor beras karena akan berdampak buruk serta merugikan petani lokal. Ketiga DPR RI mendorong pemerintah lewat Perum Bulog untuk memaksimalkan penyerapan beras dari para petani lokal untuk kebutuhan CBP atau Cadangan Beras Pemerintah dengan harga yang sesuai dan layak pada musim panen raya agar tidak ada alasan kekurangan persediaan beras di akhir tahun. Keempat terkait dengan kondisi harga beras yang masih tinggi meskipun pemerintah telah melakukan impor beras DPR RI mendorong pemerintah untuk tegas melakukan audit stok gudang

dari perusahaan-perusahaan besar guna mencegah penimbunan serta memengaruhi harga beras nasional.

Melalui Komisi IV yang membidangi sektor pertanian DPR RI juga mendorong pemerintah dan pihak terkait untuk segera mengambil tindakan tegas guna mengurangi dampak negatif akibat cuaca ekstrem yakni *el nino* yang berdampak langsung pada produktivitas pertanian. Upaya antisipasi dan adaptasi dari dampak *el nino* yang dilakukan oleh DPR RI berdasarkan rapat kerja Komisi IV dengan Menteri Pertahanan di antaranya:

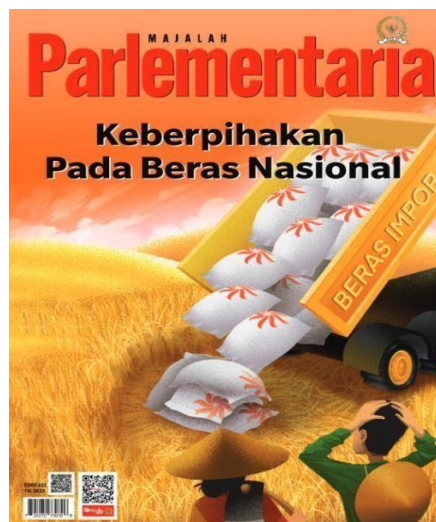
1. Melakukan identifikasi dan *mapping* lokasi yang mengalami kekeringan dengan mengelompokkan daerah berdasarkan kondisinya yakni merah yang merupakan daerah kering, kuning daerah dengan cukup air, dan hijau yang merupakan daerah subur.
2. Melaksanakan percepatan tanam untuk mengejar sisa hujan.
3. Meningkatkan persediaan alat dan mesin pertanian guna percepatan tanam.
4. Menambah dan memaksimalkan ketersediaan air dengan cara membangun atau memperbaiki embung yang ada.
5. Penyediaan benih untuk lahan kekeringan.
6. Melakukan pengembangan pupuk organik yang terpusat dan mandiri.
7. Memberikan dukungan berupa pembiayaan KUR dan asuransi pertanian.

DPR RI melalui upaya tersebut tidak hanya melakukan *monitoring* tetapi juga membuat strategi serta menyiapkan anggaran guna memperluas area tanam padi dan meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. DPR RI berkomitmen untuk memastikan

sektor pertanian di Indonesia mendapatkan perhatian khusus yang efektif guna mendukung kesejahteraan petani serta ketahanan pangan di Indonesia.

3.1.3 Proses Penonjolan Masalah

Penonjolan masalah merujuk pada langkah-langkah yang diambil oleh DPR RI dalam menyoroti masalah yang dianggap menjadi urgensi dan relevan untuk ditangani oleh pemerintah. Dalam hal ini DPR RI bertindak sebagai kepanjangan tangan antara masyarakat dan pihak pemerintah guna memastikan kebijakan yang diambil dapat menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi sektor pertanian di Indonesia. DPR RI dalam hal ini juga berupaya untuk menyuarakan kesadaran terkait isu-isu yang memerlukan perhatian intens dari pemerintah. Keberpihakan DPR RI terhadap isu yang membutuhkan perhatian intens dari pemerintah ditonjolkan melalui Majalah Parlementaria.



Gambar 3.9 Majalah Parlementaria Keberpihakan Pada Beras Nasional

Sumber: Majalah Parlementaria DPR RI

DPR RI melalui Majalah Parlementaria edisi 222 tahun 2023 menekankan tantangan terkait fluktuasi harga dan pasokan beras sebagai fokus utama. DPR RI menekankan pentingnya menjaga kestabilan pasokan beras guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini DPR RI berupaya dalam mendorong perhatian dari pemerintah untuk segera mengambil tindakan yang diperlukan mulai dengan mengadakan rapat dengar pendapat bersama pihak terkait serta melakukan evaluasi kebijakan yang ada, DPR RI juga mempertegas pentingnya kestabilan pasokan beras di Indonesia serta perlindungannya terhadap petani lokal. DPR RI tidak hanya melakukan identifikasi masalah tetapi gencar menyuarakan kepentingan isu-isu terkait ketahanan pangan di Indonesia termasuk fluktuasi harga serta dampak perubahan iklim yang memiliki dampak langsung pada produksi beras lokal.

DPR RI dalam Majalah Parlementaria edisi 222 tahun 2023 juga menyinggung mengenai urgensi isu beras nasional terhadap ketahanan pangan. Hal ini menjadi perhatian DPR RI dikarenakan Indonesia sering kali mengalami surplus produksi beras dari hasil panen raya namun pemerintah terus melakukan impor beras. DPR RI melihat kebijakan impor beras yang dilakukan oleh pemerintah apabila terus dilanjutkan akan menimbulkan ancaman serius terhadap kesejahteraan petani lokal serta ketahanan pangan di Indonesia karena kebijakan impor akan menurunkan harga beras lokal yang mana hal ini akan berimbas langsung dan merugikan petani di Indonesia serta mengancam keberlanjutan produksi pangan lokal.

Pelemik Impor di Tengah Panen Beras

Kebijakan impor beras, memang selalu jadi cerita menyedihkan bagi para petani. Apalagi, saat produksi beras begitu melimpah di dalam negeri. Beras lokal tak terserap, malah ditimbun beras impor.

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menyampaikan cadangannya, impor beras sangat menyedihkan bagi petani. Terlebih, sejak Januari hingga April 2023, produksi beras dalam negeri sudah surplus. Kondisi ini sudah terdapat sebelum ada krisis El Nino yang berdampak puncaknya berada pada Agustus 2023.

Selanjutnya, dengan impor tersebut, semakin membuat petani merasa, kondisi saat ini sedang terjadi musim panen raya di beberapa wilayah Indonesia. Petani merasa karena impor tersebut membuat serapan panen petani oleh pemerintah menjadi tidak maksimal.

"Berkas impor beras menjadi isu hangat di tengah musim panen raya di beberapa wilayah di Indonesia dengan dalih sebagai cadangan stok. Namun, tentu akan membuat serapan panen masyarakat menjadi tidak maksimal dengan harga yang mahal," ujar Nevi.

Hal itu diungkapkan dengan musim panen beras yang akan berakhir pada Juni 2023. Namun, serapan



Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina

beras petani oleh Bulog dinilai belum maksimal. Bulog menyimpulkan serapan beras dalam negeri pada 2023 baru mencapai 600 ribu ton per Juni 2023. Jumlah tersebut terdiri dari stok cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar 200 ribu ton dan stok beras komersial sebesar 500 ribu ton.

Hal itulah yang diungkapkan Petrus PCS tersebut. Sebelumnya, mengungkap rencana El Nino. Bulog selaku Bulog yang bergerak di bidang logistik pangan, dapat melakukan penyerapan beras lokal dengan harga yang murah. Namun, karena harga lokal impor, kita berharap serapan beras di masyarakat dengan harga yang lebih, juga akan dengan serapan bahan pokok lain di masyarakat," imbuhnya.

“Tidak Hanya Antisipasi El Nino

“Tidak Hanya Antisipasi El Nino, pemerintah harus memastikan bahwa kebutuhan impor beras tersebut tidak hanya untuk mengantisipasi kekurangan karena ada bencana kelangkaan El Nino.

Kami mengungkap Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan cadangan beras pemerintah dari luar negeri, yaitu sebesar 2 juta ton sampai dengan akhir Desember 2023

Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan cadangan beras pemerintah dari luar negeri, yaitu sebesar 2 juta ton sampai dengan akhir Desember 2023



Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina, Bulog harus tetap berpegang pada petani

"Pak Presiden itu sangat sayanginya sama keluarga yang kurang beruntung sampai menyekolahkan (beras) 3 bulan dibayar 10 kg untuk 10.303 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) cadangan" katanya Bulog hanya 200 ribu ton. Padahal, itu sangat kurang beruntung perlu banget beras. Jangan kita berpikir itu sekecil. Ini ada NKRI," jelas Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Ariat Prasetyo Adi.

Lelaki lanjut, Ariat mengungkapkan bahwa dalam rapid koordinasi yang dilakukan presiden yang dibuat seluruh menteri terkait, sudah mengemuka kebutuhan untuk melakukan impor beras. "Sedikit kebutuhan impor tidak impor, karena dari lain-lain itu kan dalam rapid koordinasi bersama menteri terkait. Kita enggak mungkin Kepala Badan Pangan saja atau presiden saja atau menteri saja Pak. Menteri juga ada di situ. Kita, ya kita keabsahan, nih buat NKRI. Jadi, pada saat presiden melakukan, misalnya Pak A, semua menteri, kepala badan itu, enggak boleh satu pun enggak," tukas dia.

Adapun dasar Pemerintah Indonesia yang berencana mengimpor beras dua juta ton pada 2023 termuat dalam Surat Pengutusan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) yang diteliti 24 Maret 2023. "Kami

menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan cadangan beras pemerintah dari luar negeri, yaitu sebesar 2 juta ton sampai dengan akhir Desember 2023," tulis Bapanas dalam suratnya. Senin (27/3/2023).

Kendati demikian, Presiden Jokowi menyatakan rencana impor beras tahun ini bukan untuk penangan pangan, melainkan untuk antisipasi fenomena cuaca El Nino yang dapat mengganggu produksi beras. "Dengan sampai, nanti pas sudah musim kering panjang kita banyak mau beli beras, karena barangnya enggak ada," kata Jokowi, disuarakan akan

YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (8/4/2023) lalu.

Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Perdagangan, harga beras di Indonesia terus naik sepanjang kuartal pertama 2023. Pada Maret 2023 rata-rata harga beras kualitas premium secara nasional sudah mencapai Rp13.713 per kg. Harga tersebut naik 1,4 persen dibanding Februari 2023 (month-on-month/mom), meningkat 10,6 persen dibanding Maret 2022 (year-on-year/yoy), sekaligus menjadi rekor tertinggi baru dalam lima tahun terakhir.

Kenaikan juga terjadi pada beras kualitas medium. Pada Maret 2023 rata-rata harga beras medium nasional mencapai Rp12.889 per kg. Harga naik 1,4 persen (mom) meningkat 1,4 persen (yoy), dan menjadi harga tertinggi sejak 2018.

"Harga beras ini belum berhasil kita turunkan sampai hari ini. Bahkan, cenderung bisa naik dan naiknya ini enggak sedikit, sudah lebih dari Rp1.000. Walaupun data menunjukkan adanya surplus beras tonjok," ujar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam rapat dengan Komisi VI DPR, diantar Kadisa. Selasa (18/7/2023) siang. (bby/nby) — **ANTARA**



Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina

Gambar 3.10 Respons Anggota DPR RI Mengenai Impor Beras

Sumber: Majalah Parlemen DPR RI

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina melalui Majalah Parlemen Edisi 222 Tahun 2023 mengatakan kebijakan pemerintah melakukan impor beras merugikan petani. Petani lokal dalam hal ini dirugikan karena impor beras yang dilakukan pemerintah mengakibatkan serapan panen petani lokal oleh pemerintah tidak maksimal dan harga beras anjlok yang berakibat langsung pada tingkat kesejahteraan petani lokal. Nevi menyebutkan kebijakan mengimpor beras yang dilakukan oleh pihak pemerintah selalu menjadi satu hal yang menyedihkan bagi para petani lokal mengingat produksi beras begitu melimpah di dalam negeri namun ditimbun dengan adanya beras impor.

Kebijakan pemerintah untuk melakukan impor beras secara besar-besaran tidak hanya berisiko melemahkan sektor pertanian lokal tetapi juga mengakibatkan ketergantungan pada sumber pangan dari luar negeri yang mana hal ini bertentangan dengan konsep ketahanan pangan berkelanjutan yang menekankan pentingnya kemampuan suatu Negara untuk mandiri memenuhi kebutuhan pangannya dengan cara mengedepankan produksi dalam negeri. Ketergantungan ini dapat menimbulkan

kerentanan dalam jangka panjang apabila pasokan global mengalami penurunan drastis akibat perubahan iklim yang ekstrim.

3.2 Hambatan

Proses pelaksanaan komunikasi organisasi kerap memunculkan adanya hambatan yang akan berdampak mengganggu jalannya komunikasi. Hambatan DPR RI saat merumuskan isu beras nasional pada Majalah Parlementaria Edisi 222 tahun 2023 yakni adanya hambatan internal. Hambatan yang ditemukan dalam merumuskan isu yakni jawaban yang normatif dari narasumber dan adanya perbedaan pendapat. Agung Hidayat selaku informan mengatakan jawaban normatif dari narasumber merupakan dinamika dalam proses perumusan Majalah Parlementaria dikarenakan DPR RI merupakan lembaga politik yang memiliki *statement statement* bersifat politis dan anggotanya adalah homo politik sehingga hal tersebut menimbulkan turbulensi yang dinamikanya sangat tinggi. Hal tersebut menjadi hambatan sekaligus tantangan karena DPR RI harus lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan berbagai sudut pandang yang ada untuk memastikan isu yang akan diangkat setiap bulannya dalam Majalah Parlemntaria untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi publik.

Hambatan yang kedua yakni tidak adanya evaluasi dari kegiatan *agenda setting* yang telah dilaksanakan oleh DPR RI. *Agenda setting* tanpa adanya evaluasi yang jelas akan sulit untuk mengukur tingkat keberhasilan tujuan yang diinginkan yang mana hal ini akan berdampak pada kredibilitas DPR RI di pandangan publik. DPR RI perlu melakukan evaluasi yang jelas agar dapat menilai secara tepat keefektifan dari kegiatan *agenda setting* yang telah dilaksanakan.